



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIGUGUR

Jalan. Raya Jurago No. 361. 46392

Email : kecamatan cigugur@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CIGUGUR
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/ 39.a / Kpts -Kec./2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

CAMAT CIGUGUR
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Cigugur RPJPD, RPJMD dan RKPD, dipandang perlu menyusun Rancangan Cigugur Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan

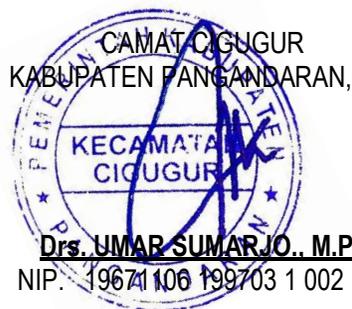
- Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
 42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
 43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan penjabaran dari Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.
- KETIGA : Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Cigugur
Pada tanggal 25 Juli 2023

CAMAT CIGUGUR
KABUPATEN PANGANDARAN,
KECAMATAN
CIGUGUR



Drs. UMAR SUMARJO., M.Pd
NIP. 196711061997031002

Lampiran : **KEPUTUSAN CAMAT CIGUGUR KAB. PANGANDARAN**
NOMOR : 050/ / Kpts – Kec./ 2024
TANGGAL : 25 Juli 2023

**PENGESAHAN PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN
CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN
2024**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
1. Kecamatan Cigugur
 2. Sistematisa Penetapan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Cigugur RPJPD, RPJMD dan RKPD, Dengan sistematisa sebagai berikut :
 - I. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Penetapan
 - 1.4. Sistematisa Penulisan
 - II. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2024
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2024
 - 2.2. Permasalahan Yang Ada Pada SKPD
 - III. Rencana Penetapan Program dan Kegiatan
 - 3.1. Penetapan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
 - IV. Penutup
- B. Program dan Kegiatan Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigugur Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Cigugur Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Ditetapkan di Cigugur
Pada tanggal 25 Juli 2023


CAMAT CIGUGUR
KABUPATEN PANGANDARAN,
Drs. UMAR SUMARJO., M.Pd
NIP. 196711061997031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Penetapan Renja SKPD Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). Peraturan tersebut secara substansi mengamankan penyusunan Rancangan Awal Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2024, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Renja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Penetapan Renja Kecamatan Cigugur tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Penetapan Renja Tahun 2024 Kecamatan Cigugur adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pangandaran yang telah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan (RENJA) untuk tahun 2024 yang merupakan dokumen awal Perencanaan Kecamatan Cigugur untuk periode 1 (satu) tahun dimaksudkan untuk menguraikan kegiatan- kegiatan Kecamatan Cigugur secara sistematis mulai dari sasaran dan pembiayaan sesuai program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun, yang selanjutnya dijadikan sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan tahunan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian Program dan Kegiatan pelayanan Kantor Kecamatan Cigugur;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Kecamatan Cigugur;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen rancangan awal perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen Rancangan Awal Renja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja dan sistematika penulisan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja.

- 1.1 Latarbelakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan fungsi Kecamatan adalah :

- a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
- d) Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan.
- e) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
- f) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALUDAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kecamatan Cigugur, sebagai berikut :

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi s/d Tahun 2022 bukan 2023
Kecamatan Cigugur
Kabupaten Pangandaran

Kecamatan Cigugur

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7		Unsur Wilayah								
7	1	Kecamatan Cigugur								
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2.Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3.Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	24 Dokumen	4	7	7	100	7	18	75%
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1	0	0	0	0	1	25%
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1	0	0	0	0	1	25%
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1	0	0	0	0	1	25%
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1	0	0	0	0	1	25%
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat	17 Laporan	2	7	7	100	7	16	94%
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/bulan	11	11	11	100	11	33	50

7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26 4 Dokumen	48	24	24	100	24	96	36
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Dokumen	1	4	4	100	4	9	150
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	1	0	0	0	0	1	20
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	1	2.03	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	61 Laporan	12					12	20
7	1	1	2.03	6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	12	1	1	100	1	14	23
7	1	1	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
7	1	1	2,1	2	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	2,1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	61 Dokumen	12	1	1	100	1	14	23
7	1	1	2,1	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 Dokumen	12	0	0	0	0	12	20
7	1	1	2,1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	11	0	0	0	0	11	20

7	1	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%							
7	1	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	1	60	2	3,3	60	63	12,6
7	1	1	2,1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1	160	30	18,75	160	191	38,2
7	1	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15 Paket	3	40	40	100	40	83	83,0
7	1	1	2,1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	240 Dokumen	48	2	2	100	2	52	0,2
7	1	1	2,1		Penyediaan Barang/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	1	0	0	0	0	1	0,2
7	1	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475 Laporan	9	326	90	27,6	326	425	0,9
7	1	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	100%							
7	1	1	2.07		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Paket	1	0	0	0	0	0	0
7	1	1	2,1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8 Unit	4	0	0	0	0	0	0
7	1	1	2,1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	1	0	0	0	0	0	0
7	1	1	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%							

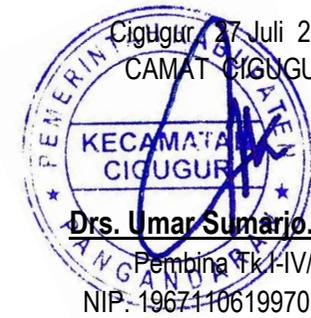
7	1	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Menyurat	60 Laporan	12	240	150	62,5	200	362	6,03
7	1	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	24	2	2	100	2	28	23
7	1	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 Laporan	48	12	12	100	12	72	30
7	1	1	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%							
7	1	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	5	0	0		0	5	20
7	1	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	0	6	6	100	6	12	200
7	1	1	2,1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	12	2	2	100	2	16	26
7	1	1	2,1	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	0	3	3	100	3	6	200
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%							

7	1	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12	2	2	100	2	16	0,3
7	1	2	2.02		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60 Laporan	12	320	60	18,75	12	84	140
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 5 Lembaga	21	7	7	100	7	35	33,3
7	1	3	2.01		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39 Laporan	0	0	0	0	0	0	0
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENATSE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	4	2.01	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.	60 Laporan	12	0	0	0	0	12	0,2	
7	1	5			PRIGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	35 Dokumen	7	0	0	0	0	7	100	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	1	6	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawai Pemerintah Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	1	6	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	35 Dokumen	7	0	0	0	0	7	100%	
7	1	6	2	#	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 Dokumen	1	7	7	100	7	15	300%	

7	1	6	2	#	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	35 Laporan	7	7	7	100	7	21	60%
---	---	---	---	---	---	--	------------	---	---	---	-----	---	----	-----

Cigugur, 27 Juli 2023
CAMAT CIGUGUR



Drs. Umar Sumarjo., M.Pd
Pembina Tk. I-IV/b
NIP. 196711061997031002

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja Kecamatan Cigugur berdasarkan sasaran strategis dilakukan dengan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Tahun 2012, sasaran dari capaian kinerja meliputi :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SPM/Standar dan Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah Pelayanan Pembuatan e-KTP											
2.	Jumlah Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)											

NIHIL

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cigugur bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pangandaran;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan

kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company / Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) dimana pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat mencapai MDGs (Millenium Develompment Goals);
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan dan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Cigugur harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat diketahui dari pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2022 yaitu 86,17%, hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan terhadap rancangan awal dapat direalisasikan dengan baik. Dalam menunjang pelaksanaan Rancangan Awal RKPD menurut identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan setelah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai. Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.31 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Cigugur.

REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN PANGANDARAN

NAMA SKPD : KECAMATAN CIGUGUR

Tabel T-C.31

No.					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebuthan Dana Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	12
7					UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7	1				KECAMATAN				1.791.055.035	KECAMATAN				1.791.055.035	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEC. CIGUGUR	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	1.664.320.985	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEC. CIGUGUR	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	1.664.320.985	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	37.921.360	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	37.921.360	
					Penyusunan Dokumen	KEC.	Jumlah dokumen	4	35.038.000	Penyusunan Dokumen	KEC.	Jumlah dokumen	3	35.038.000	

7	1	1	2,0 1	1	Perencanaan Perangkat Daerah	CIGUGUR	perencanaan perangkat Daerah	Dokumen		Perencanaan Perangkat Daerah	CIGUGUR	perencanaan perangkat Daerah	Dokumen			
7	1	1	2,0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0,00		
7	1	1	2,0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	352.840	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	352.840		
7	1	1	2,0 2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	352.840	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	352.840		
7	1	1	2,0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	352.840	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	352.840		
7	1	1	2,0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	352.840	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	352.840		
7	1	1	2,0 2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat	5 Laporan	1.472.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat	2 Laporan	1.472.000		
7	1	1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	1.324.991.836	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	1.324.991.836		

7	1	1	2,0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEC. CIGUGUR	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	1.291.969.012	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEC. CIGUGUR	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	1.291.969.012
7	1	1	2,0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	30.686.400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	30.686.400
7	1	1	2,0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KEC. CIGUGUR	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	352.840	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KEC. CIGUGUR	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	352.840
7	1	1	2,0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan / Semesteran SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1.983.584	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan / Semesteran SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.983.584
7	1	1	2,0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	29.024.480	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	29.024.480
7	1	1	2,0 3	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	346.880	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	346.880
7	1	1	2,0 3	6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	61 Laporan	28.677.600	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	28.677.600
7	1	1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	100	33.753.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	100	33.753.000

7	1	1	2,0 5	2	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KEC. CIGUGUR	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KEC. CIGUGUR	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	-
7	1	1	2,0 5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	22.185.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	22.185.000
7	1	1	2,0 5	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1.568.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1.568.000
7	1	1	2,0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KEC. CIGUGUR	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KEC. CIGUGUR	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	10.000.000
7	1	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	69.968.253	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	69.968.253
7	1	1	2,0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KEC. CIGUGUR	Jenis Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	2.265.145	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KEC. CIGUGUR	Jenis Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	2.265.145
7	1	1	2,0 6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC. CIGUGUR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	31.998.180	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC. CIGUGUR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		31.998.180
7	1	1	2,0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KEC. CIGUGUR	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	3.528.960	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KEC. CIGUGUR	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	3.528.960

7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	4.220.568	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KEC. CIGUGUR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	4.220.568	
7	1	1	2,06		Penyediaan Barang/Material	KEC. CIGUGUR	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan		0,00	Penyediaan Barang/Material	KEC. CIGUGUR	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 Paket	0,00	
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	27.955.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	27.955.400	
7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	100%	-	
7	1	1	2,07		Pengadaan Mebel	KEC. CIGUGUR	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		-	Pengadaan Mebel	KEC. CIGUGUR	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Unit	-	
7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC. CIGUGUR	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC. CIGUGUR	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		-	
7	1	1	2,07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KEC. CIGUGUR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KEC. CIGUGUR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	-	
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	109.096.976	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	109.096.976	
7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	170 Laporan	1.440.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	170 Laporan	1.440.000	

7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.500.000
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	79.156.976	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	79.156.976
7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	59.565.080	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	59.565.080
7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KEC. CIGUGUR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	54.565.080	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KEC. CIGUGUR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	54.565.080
7	1	1	2,09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KEC. CIGUGUR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	0,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KEC. CIGUGUR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	0,00
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC. CIGUGUR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC. CIGUGUR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000
7	1	1	2,09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KEC. CIGUGUR	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KEC. CIGUGUR	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi		-

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC. CIGUGUR	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	17.037.680	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC. CIGUGUR	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	17.037.680
7	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KEC. CIGUGUR	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	0,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KEC. CIGUGUR	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	0,00
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	0,00
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC. CIGUGUR	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	17.037.680	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC. CIGUGUR	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	17.037.680
0 0 0 7	1	2	2.0 1		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	17.037.680	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	17.037.680
7	1	2	2.0 1	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEC. CIGUGUR	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	16.228.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEC. CIGUGUR	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	16.228.000

7	1	3			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KEC. CIGUGUR	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	16.228.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KEC. CIGUGUR	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	16.228.000
7	1	3	2.0 1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KEC. CIGUGUR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembag a Masyara kat	4.130.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KEC. CIGUGUR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembag a	4.130.600
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	12.097.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. CIGUGUR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	12.097.400
7	1	3	2.0 1		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KEC. CIGUGUR	PERSENTASE KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	4.315.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KEC. CIGUGUR	PERSENTASE KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	4.315.000
7	1	4			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KEC. CIGUGUR	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	4.315.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KEC. CIGUGUR	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	4.315.000
7	1	4	2.0 1		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KEC. CIGUGUR	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.	7 Laporan	4.315.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KEC. CIGUGUR	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.	7 Laporan	4.315.000
7	1	4	2.0 1	1	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KEC. CIGUGUR	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	3.470.200	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	KEC. CIGUGUR	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	3.470.200
7	1	5			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	3.470.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KEC. CIGUGUR	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	3.470.200

7	1	5	2.0 1		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	KEC. CIGUGU R	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7 Dokumen	3.470.200	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	KEC. CIGUGU R	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7 Dokumen	3.470.200
7	1	5	2.0 1	7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KEC. CIGUGU R	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	85.683.170	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KEC. CIGUGU R	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	85.683.170
7	1	6			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEC. CIGUGU R	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	85.683.170	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEC. CIGUGU R	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	85.683.170
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KEC. CIGUGU R	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	27.166.620	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KEC. CIGUGU R	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	27.166.620
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	KEC. CIGUGU R	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	43.047.590	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	KEC. CIGUGU R	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	43.047.590
7	1	6	2.0 1	1 3	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	KEC. CIGUGU R	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.468.960	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	KEC. CIGUGU R	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.468.960

Mengetahui,
Camat Cigugur



Drs. UMAR SUMARJO., M.Pd

Pembina Tk. 1, IV/b
NIP. 19671106 199703 1 002

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kantor Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang kabupaten.

Penelaahan / review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat dalam bentuk hasil musrenbang untuk Kecamatan Cigugur tidak ada usulan.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.32 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Pangandaran

Kecamatan Cigugur				Tabel T-C.32	
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
<i>NIHIL</i>					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN KABUPATEN

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Pangandaran, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Pangandaran telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026.

a. Visi & Misi Bupati Pangandaran 2021-2026

Visi Kabupaten Pangandaran untuk 2021-2026 yaitu :

“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BEKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA”

- Misi
1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
 2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
 3. Mengembangkan aksesibilitas Pendidikan sampai Perguruan Tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
 4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal
 5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
 6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

b. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

1. Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja;
2. Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting;
4. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan;
5. Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat- pusat Pertumbuhan Ekonomi;
6. Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA KECAMATAN CIGUGUR

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Cigugur mempunyai arah yang dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan : 1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang mampu memberikan Pelayanan Public yang Prima, melalui peningkatan Nilai LHE AKIP Kecamatan Cigugur meningkat s.d tahun 2026 = 87,25 dan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cigugur meningkat s.d tahun 2026 = 95,00

Sasaran : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Cigugur, program- program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**
 - 1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1.4.3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.4.4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - 1.5.5 Penyediaan Bahan / Material
 - 1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1.6.1 Pengadaan Mebel
 - 1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan :

2.1.1 Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan :

2.2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan SubKegiatan :

2.3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di WilayahKecamatan

c. Kegiatan lain yang tidak masuk anggaran SKPD antara lain sebagai berikut :

Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi :

- Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
- Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program DanKegiatan SKPD Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Cigugur

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran**

Nama SKPD : Kecamatan Cigugur

T-C.33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-5	-11	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN				
7	1	KECAMATAN			1.791.055.035	KECAMATAN			1.715.492.261	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	KEC. CIGUGUR	100%	1.664.320.985	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	1.547.919.361
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	100%	37.921.360	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	44.366.500

7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	KEC. CIGUGUR	4 Dokumen	35.038.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	41.538.000
7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KEC. CIGUGUR		0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
7	1	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KEC. CIGUGUR	1 Dokumen	352.840	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	374.000
7	1	1	2,02	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KEC. CIGUGUR	1 Dokumen	352.840	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	374.000
7	1	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KEC. CIGUGUR	1 Dokumen	352.840	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	374.000
7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KEC. CIGUGUR	1 Dokumen	352.840	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	374.000
7	1	1	2,02	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat	KEC. CIGUGUR	5 Laporan	1.472.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.332.500
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	KEC. CIGUGUR	100%	1.324.991.836	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.219.602.776
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KEC. CIGUGUR	11 Orang/bulan	1.291.969.012	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	1.180.018.676
7	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KEC. CIGUGUR	48 Dokumen	30.686.400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	37.460.100

7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KEC. CIGUGUR	1 Laporan	352.840	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	374.000
7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KEC. CIGUGUR	3 Laporan	1.983.584	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan	1.750.000
7	1	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	KEC. CIGUGUR	100%	29.024.480	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	29.553.000
7	1	1	2,03	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KEC. CIGUGUR	12 Laporan	28.677.600	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	374.000
7	1	1	2,03	6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KEC. CIGUGUR	61 Laporan	346.880	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	29.179.000
7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	KEC. CIGUGUR	100	33.753.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	34.420.000
7	1	1	2,05	2	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KEC. CIGUGUR	0	-	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	5.000.000
7	1	1	2,05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	KEC. CIGUGUR	12 Dokumen	22.185.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	22.920.000
7	1	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	KEC. CIGUGUR	12 Dokumen	1.568.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1.500.000
7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KEC. CIGUGUR	3 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11 Orang	5.000.000

7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	KEC. CIGUGUR	100%	69.968.253	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	47.400.000
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KEC. CIGUGUR	2 Paket	2.265.145	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	2.400.000
7	1	1	2,06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	KEC. CIGUGUR	20 Paket	31.998.180	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	KEC. CIGUGUR	3 Paket	3.528.960	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		3 Paket	4.000.000
7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	KEC. CIGUGUR	3 Dokumen	4.220.568	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		48 Dokumen	3.500.000
7	1	1	2,06		Penyediaan Barang/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	KEC. CIGUGUR		0,00	Penyediaan Barang/ Material			10.000.000
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC. CIGUGUR	95 Laporan	27.955.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		95 Laporan	27.500.000
7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	KEC. CIGUGUR	100%	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	30.000.000
7	1	1	2,07		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	KEC. CIGUGUR		0,00	Pengadaan Mebel		1 Paket	25.000.000
7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	KEC. CIGUGUR		0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4 Unit	
7	1	1	2,07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	KEC. CIGUGUR		0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	5.000.000

7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	KEC. CIGUGUR		109.096.976	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	131.211.453
7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC. CIGUGUR	170 Laporan	1.440.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.400.000
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KEC. CIGUGUR	12 Laporan	28.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		24 Laporan	23.430.000
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KEC. CIGUGUR	4 Laporan	79.156.976	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		48 Laporan	105.381.453
7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	KEC. CIGUGUR	100%	59.565.080	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	11.365.632
7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KEC. CIGUGUR	5 Unit	54.565.080	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		5 Unit	5.865.632
7	1	1	2,09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KEC. CIGUGUR	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KEC. CIGUGUR	12 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Unit	5.500.000
7	1	1	2,09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	KEC. CIGUGUR		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC. CIGUGUR	100%	17.037.680	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	66.550.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KEC. CIGUGUR	100%	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. CIGUGUR	12 Laporan	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC. CIGUGUR	100%	17.037.680	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	66.550.000
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KEC. CIGUGUR	12 Laporan	17.037.680	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	12 Laporan	66.550.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEC. CIGUGUR	100%	16.228.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	4.658.500
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KEC. CIGUGUR	100%	16.228.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	4.658.500

7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KEC. CIGUGUR	0	4.130.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga	4.658.500
7	1	3	2.01		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. CIGUGUR	7 Lembaga Masyarakat	12.097.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	-
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KEC. CIGUGUR	100%	4.315.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	4.658.500
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KEC. CIGUGUR	100%	4.315.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	4.658.500
7	1	4	2.01	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.	KEC. CIGUGUR	7 Laporan	4.315.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan	4.658.500
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	KEC. CIGUGUR	100%	3.470.200	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	3.859.900
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KEC. CIGUGUR	100%	3.470.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	3.859.900
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan	KEC. CIGUGUR	7 Dokumen	3.470.200	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan	7 Dokumen	3.859.900

					tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	oleh Instansi Vertikal				tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KEC. CIGUGUR	100%	85.683.170	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	87.846.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawai Pemerintah Desa	KEC. CIGUGUR	100%	85.683.170	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	87.846.000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KEC. CIGUGUR	12 Dokumen	27.166.620	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	17.303.000	
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	KEC. CIGUGUR	2 Dokumen	43.047.590	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	53.240.000	
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	KEC. CIGUGUR	12 Laporan	15.468.960	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	17.303.000	

Mengetahui,
Camat Cigugur



Drs. UMAR SUMARJO., M.Pd

Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 19671106 199703 1 002

BAB IV

RANCANGAN AWAL RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Cigugur Tahun Anggaran 2024 program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 1.664.320.985,00,-, membidangi :
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, berupa Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, berupa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ;
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, berupa Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, berupa Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya, Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, berupa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan, penyediaan bahan / material, serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, berupa Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya, serta Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, berupa Penyediaan Jasa Surat menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor;
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, berupa Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, serta Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp 17.037.680,00,-, membidangi :
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, berupa Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait;
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, berupa Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 16.228.000,00,- membidangi :
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 4.315.000,00,- membidangi :
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, berupa Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp 3.470.200,00,-, membidangi :
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, berupa Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- f) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 85.683.170,00,- membidangi:
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.
Kemasyarakatan, Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.
- Dalam hal pendanaan agar pelaksanaan Rencana Kerja yang sudah ditentukan berjalan dengan lancar dan anggaran tersebut terdapat dalam RKA Kecamatan Cigugur Tahun 2023, dalam pelaksanaan program dan kegiatan seluruhnya menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan pembangunan. Rencana Kerja ini akan selalu dievaluasi supaya diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi serta dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/ Kegiatan di masa yang akan datang dan pada akhirnya dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya Rencana Kerja ini tidak mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran agar pendayaguna Aparatur Sipil Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dapat mewujudkan Kecamatan Cigugur yang terdepan dalam pertanian, agribisnis dan peningkatan destinasi wisata kultural dengan tetap mempertahankan agama serta budayalokal sebagai pandangan hidup di tahun 2024, sebagai daya dukung visi Kabupaten Pangandaran untuk **“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BEKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA”**.

Cigugur, 27 Juli 2023
CAMAT CIGUGUR



Drs. UMAR SUMARJO., M.Pd
NIP. 19671106 199703 1 002